



Media Title	Investor Daily		
Head Line	Draft Perpres Tol Trans-Sumatera Disusun Ulang		
Date	13 Feb 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	ean	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

## Draf Perpres Tol Trans-Sumatera Disusun Ulang

JAKARTA – Pemerintah akan menyusun ulang draf peraturan presiden (perpres) mengenai pembangunan tol Trans-Sumatera. Draf tersebut akan lebih berisi mengenai pedoman dan persyaratan pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 kilometer tersebut.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menegaskan, dalam draf tersebut juga tidak akan ada pasal yang berisi penunjukan langsung terhadap badan usaha untuk membangun jalan tol Trans-Sumatera. "Idealnya memang perpres Trans-Sumatera hanya bicara konsep, kriteria, dan tingkat pengembalian investasi kepada investor," tutur dia di Jakarta, Rabu (12/2).

Djoko menambahkan, setelah ada pedoman ini, maka penunjukan langsung perusahaan bisa dilakukan lewat peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Dengan konsep seperti itu, proyek tol Trans-Sumatera bisa dikerjakan oleh perusahaan yang benar-benar siap dan memenuhi persyaratan. "Bila nantinya PT Hutama Karya benar ditunjuk, proyek ini bisa dikerjakan bersama dengan badan usaha lain," jelas dia.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengakui, pihaknya tengah mengkaji dan menyusun ulang draf perpres pem-

angunan tol Trans-Sumatera. Proses ini akan dimulai lagi dari awal. "Saya memang sedang diminta untuk membahas perpres ini kembali," katanya.

Menurut dia, perpres pembangunan tol Trans-Sumatera sudah lama dikirim ke Sekretariat Kabinet. Namun, perpres ini tidak juga ditandatangani Presiden. "Saat ini adalah mencari apa yang dipermasalahkan agar terrealisasinya pembangunan jalan tol yang menghubungkan Aceh-Lampung ini," ujar dia.

Rencananya, draf baru perpres pembangunan tol Trans-Sumatera ini akan dibicarakan dalam rapat terbatas (ratas) dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi Menteri Pekerjaan Umum belum bisa memastikan kapan rapat itu dilaksanakan. "Yang jelas kami selesaikan secepatnya dan akan langsung dibahas di ratas," imbuh dia.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fachtur Rochman mengatakan, menyiapkan proyek tol Trans-Sumatera dengan kebutuhan pendanaan hingga ratusan triliun tidaklah sederhana. Diperlukan komitmen besar dan kuat antara lembaga pemerintah, baik di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, maupun di lingkungan Istana. "Tapi komitmen itu tidak terlihat selama ini," kata dia.

Kendati demikian, sambung dia, ide menunjuk salah satu perusahaan negara, dalam hal ini PT Hutama Karya untuk membangun jalan tol tersebut, bukanlah ide buruk. Namun begitu, antar-instansi pemerintah harus sudah satu suara dan berkomitmen membangun jalan tol Trans-Sumatera.

"Apalagi pemerintah selalu anggap proyek tol Trans-Sumatera prioritas. Jika demikian, harus ada cara di luar cara biasa, yaitu melalui perpres. Kalau perpres tidak berani menunjuk, berarti sama saja dengan mekanisme yang lama," ungkap Fachtur.

Terkait adanya rencana penyusunan ulang draf perpres tol Trans-Sumatera, menurut dia, merupakan suatu kemunduran. Apalagi, dengan kondisi yang ada saat ini, infrastruktur di Sumatera sudah sangat terlambat untuk dibangun. "Terlebih jika proses tol Trans-Sumatera ini juga diundur," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah akan memulai pembangunan empat ruas tol Trans-Sumatera terlebih dahulu. Keempat ruas tol itu adalah tol Medan-Binjai 16,8 km dengan investasi Rp 2 triliun, Tol Pekanbaru-Dumai 135 km dengan investasi Rp 14,7 triliun, Tol Palembang-Indralaya 22 km dengan investasi Rp 1 triliun, dan tol Bakauheni-Terbanggi Besar 150 km dengan investasi Rp 13,8 triliun. (ean)